

**KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BANDAR LAMPUNG DALAM PENGAWASAN
PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DIMASA PANDEMI COVID-19**

(Skripsi)

Oleh

AGUNG YUDA PRATAMA

NPM 1816021047



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2022

ABSTRAK

KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DIMASA PANDEMI COVID-19

Oleh

AGUNG YUDA PRATAMA

Pandemi covid-19 melanda Indonesia dan berdampak cukup signifikan pada sektor perekonomian sehingga diperlukan kerja keras semua elemen termasuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk melakukan pengawasan. Kota Bandar Lampung termasuk daerah yang salah satu pendapatan terbesarnya dari sektor pajak dan retribusi sehingga pada situasi ini sangat mengalami penurunan pada sektor pendapatan asli daerah karena banyak aktifitas perekonomian yang dibatasi pada saat pandemi covid-19. Pada situasi seperti ini seharusnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung hadir sebagai lembaga legislatif melaksanakan fungsi pengawasan dan hak inisiatif untuk membantu pihak eksekutif untuk mencari solusi permasalahan perekonomian akibat dampak pandemi covid-19. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dalam pengawasan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) dimasa pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui wawancara. Hasil penelitian ini berdasarkan dari indikator pada penelitian ini yaitu disiplin, tanggung jawab, inisiatif, serta efektifitas sudah cukup baik sehingga kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung dalam pengawasan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) dimasa pandemi covid-19 sudah cukup maksimal.

Kata Kunci : Kinerja, Pengawasan, Pendapatan Asli Daerah

ABSTRACT

PERFORMANCE OF THE BOARD OF REGIONAL PEOPLE'S REPRESENTATIVES IN BANDAR LAMPUNG CITY IN SUPERVISION OF REGIONAL ORIGINAL INCOME MANAGEMENT (PAD) DURING THE COVID-19 PANDEMIC

By

AGUNG YUDA PRATAMA

The COVID-19 pandemic has hit Indonesia and has had a significant impact on the economic sector, so it takes hard work from all elements, including the Regional House of Representatives to carry out supervision. The city of Bandar Lampung is one of the areas where one of the largest revenues comes from the tax and levy sector, so in this situation, the local revenue sector has greatly decreased because many economic activities were limited during the COVID-19 pandemic. In a situation like this, the Bandar Lampung City Regional House of Representatives should be present as a legislative body carrying out its supervisory function and the right of initiative to assist the executive in finding solutions to economic problems due to the impact of the COVID-19 pandemic. The purpose of this study was to determine the performance of the Bandar Lampung City Regional House of Representatives in supervising the management of local revenue (PAD) during the COVID-19 pandemic. This study uses a descriptive type of research with a qualitative approach. Data collection techniques in this study through interviews. The results of this study are based on the indicators in this study, namely discipline, responsibility, initiative, and effectiveness, which are good enough so that the performance of the Bandar Lampung City Regional House of Representatives in supervising the management of local revenue (PAD) during the COVID-19 pandemic is quite maximal.

Keywords : Performance, Supervision, Local Revenue

**KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDAR
LAMPUNG DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH (PAD) DIMASA PANDEMI COVID-19**

Oleh

AGUNG YUDA PRATAMA

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN**

PADA

**Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2022

Judul Skripsi : **KINERJA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
DIMASA PANDEMI COVID-19**

Nama Mahasiswa : **AGUNG YUDA PRATAMA**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1816021047**

Program Studi : **ILMU PEMERINTAHAN**

Fakultas : **ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**



1. Komisi Pembimbing

Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP, M.A

NIP.197804302005011002

2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan

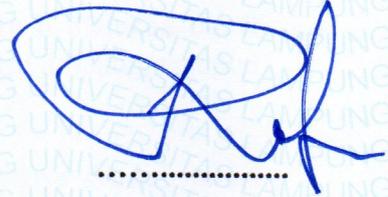
Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP

NIP. 19611218198902100

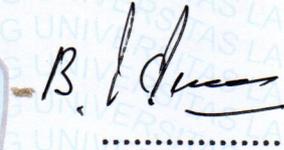
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP, M.A**



Penguji : **Budi Harjo, S.Sos, M.IP**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si

NIP. 196108071987032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 27 April 2022

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung, maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan sebutan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 26 April 2022

Yang Membuat Pernyataan



Agung Yuda Pratama

NPM. 1816021047

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Agung Yuda Pratama, dilahirkan di Desa Kota Baru Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 11 Juli 1999, Putra pertama dari pasangan Bapak Fahrudin dan Alm. Ibu Noviyanti. Penulis memiliki adik laki-laki bernama Muhammmad Rizal Saputra dan Rasyid Faturahman.

Penulis menyelesaikan pendidikan di TK Al-Ihya, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah pada tahun 2005. Selanjutnya penulis melanjutkan ke Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Kalirejo yang lulus pada tahun 2011, kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMPN) 1 Kalirejo yang lulus pada tahun 2014, dan Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 1 Kalirejo yang lulus pada tahun 2017.

Penulis diterima di Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung pada 2018 dalam program Strata Satu (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Watu Agung, Kecamatan Kalirejo, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung selama 40 hari sebagai bentuk pengabdian ke masyarakat. Selanjutnya penulis melaksanakan Praktik Kerja

Lapangan (PKL) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung selama 5,5 bulan pada Agustus 2021 sampai Januari 2022.

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(QS. Al-Baqarah: 153)

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra`d: 11)

“Belajarlah mengucap syukur dari hal baik di hidupmu. Belajarlah menjadi kuat dari hal-hal buruk di hidupmu”

(B.J. Habibie)

“Kenangan adalah memori indah masa lalu, namun masa depan jauh akan lebih indah jika kita berusaha dan bertawakal.”

(Agung Yuda Pratama)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh rusa syukur kehadiran Allah SWT, dan dengan segala ketulusan serta kerendahan hati,

Sebentuk karya kecil ini ku persembahkan kepada:

Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda Fahrudin dan Alm. Ibunda Noviyanti yang selalu mendo'akan, kasih sayang, peluk hangat, cinta kasih, tetesan keringat, dan tenaga pikiran yang tiada henti kalian berikan kepadaku, dalam setiap perjalanan hidupku. Serta selalu setia menunggu kabar gembira akan keberhasilanku dan selalu memotivasi ketika diriku lelah dan gagal. Terima kasih atas semua yang telah kalian berikan kepadaku secara ikhlas dan tulus tanpa mengharapkan balasan sedikitpun.

Kepada kedua Adik laki-lakiku Muhammad Rizal Saputra dan Rasyid Faturahman, serta sanak saudara tersayang. Kalian merupakan orang-orang tersayang yang selalu ada menemaniku dalam keadaan apapun. Terima kasih atas semua yang telah kalian berikan kepadaku.

Kepada saudara saudara seperjuanganku di Jurusan Ilmu Pemerintahan, semoga ilmu yang diperoleh bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa.

Serta

Almamaterku Tercinta, Universitas Lampung

SANWACANA

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-NYA hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Skripsi dengan judul “**Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Dalam Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dimasa Pandemi Covid-19**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung.

Kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Ida Nurhaida, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung yang telah memberikan izin untuk melaksanakan penelitian;
2. Bapak Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung atas izin dan bimbingannya;
3. Bapak Dr. Robi Cahyadi Kurniawan, S.IP, M.A selaku Pembimbing utama, atas bimbingan, motivasi, arahan, kritik ,saran, dan masukan yang positif kepada penulis serta segala bentuk bantuan selama masa studi dalam penyusunan skripsi;
4. Bapak Budi Harjo, S.Sos, M.IP selaku Penguji utama atas bimbingan, motivasi, arahan, kritik, saran, dan masukan yang positif kepada penulis serta segala bentuk bantuan selama masa studi dan penyusunan skripsi;
5. Bapak Drs. Piping Setia Priangga, M.Si selaku pembimbing akademik, atas bimbingan dan nasihat kepada penulis selama masa studi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, atas bimbingan, nasihat, dan ilmu yang diberikan kepada penulis selama masa studi.

7. Bapak dan Ibu Staf Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung, atas bimbingan, nasihat, dan ilmu yang diberikan kepada penulis selama masa studi.
8. Bapak Tri Paryono, S.Sos, MM selaku Plt. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung yang telah memberikan izin penelitian di instansi tersebut.
9. Bapak Novi Irwansyah, S.E, MM selaku Kepala Sub Bagian Informasi sekaligus pembimbing lapangan magang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung yang telah memberikan izin penelitian di Instansi tersebut.
10. Bapak dan Ibu Pegawai yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung, atas bimbingan, nasihat, dan ilmu yang diberikan kepada penulis selama penelitian;
11. Teristimewa untuk kedua Orang Tuaku tersayang dan terkasih, Bapak Fahrudin dan Alm. Ibu Noviyanti yang selalu mendoakanku dalam setiap langkahnya, yang selalu memotivasi, mengarahkan, menuntun, dan membimbing setiap langkah dan tujuanku, yang selalu mengajarkanku arti sebuah kehidupan untuk terus bersabar dan bersyukur dari aku yang belum tau apa-apa hingga aku bisa berada pada titik ini. Terima kasih telah mengajarkanku arti sebuah perjuangan, semoga cinta dan kasih sayang serta tetesan keringat dan air mata yang tercurah untukku terbalaskan nantinya, doaku selalu untuk kalian semoga sehat selalu dan diberikan umur yang panjang hingga nantinya bisa melihat anak-anak kalian sukses. Aamiin;
12. Kepada Bapak Khoerul Ahyar dan Ibu Sumarti Terimakasih atas doa, dukungan dan nasihat-nasihat yang selalu kalian berikan kepadaku *carra* terimakasih telah menyayangiku.
13. Saudaraku yang terkasih Muhammad Rizal Saputra dan Rasyid Faturahman. Terimakasih atas doa dan dukungan serta nasihat-nasihat yang selalu kalian berikan kepadaku, semoga kita menjadi anak yang sukses dan menjadi kebanggaan orangtua selalu.
14. Tercinta Ade risa Fitriani Mursidah terimakasih telah memberikan dukungan, semangat dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.

15. Teman seperjuangan magang di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Taufik Hidayat, Alfadilah Syahadi, Andi Natanael, Alviki Hidayat, Fran yang memberikan semangat, dukungan, dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Partner KKN Hendi, Kris, Anam, Resti, Belia, Tina. Terimakasih untuk kebersamaan yang begitu dekat selama masa KKN, dan juga doa, dukungan yang telah kalian berikan, semoga kita menjadi anak yang sukses nantinya;
17. Rekan-rekan Jurusan Ilmu Pemerintahan 2018, kelas reguler A, B, dan kelas paralel yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas kekeluargaan, semangat, dan kerjasama selama ini.
18. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Semoga tugas akhir yang sederhana ini dapat bermanfaat dan berguna bagi siapapun yang membacanya. Penulis berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas kebaikan mereka terhadap penulis. Aamiin.

Bandar Lampung, 26 April 2022

Penulis

Agung Yuda Pratama

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Rumusan Permasalahan	11
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
II. TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1 Teori Kinerja	13
2.2 Teori Pengawasan	14
2.3 Pengelolaan	19
2.5 Pendapatan Daerah.....	20
2.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)	20
2.7 Kerangka Pikir	23
III. METODOLOGI PENELITIAN	25
3.1 Tipe Penelitian	25
3.2 Fokus Penelitian.....	25
3.3 Lokasi Penelitian.....	26
3.4 Jenis Data	26
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	27
3.6 Teknik Pengolahan Data	28
3.7 Teknik Analisis Data.....	29

IV. GAMBARAN UMUM.....	31
4.1 Gambaran Umum Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung	31
4.1.1 Sejarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung .	31
4.1.2 Tugas Pokok, Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung	33
4.1.3 Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung	35
4.2 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung....	37
4.3 Implementasi Koordinasi Dalam Kegiatan Dokumentasi Dan Publikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung	38
4.4 Profil Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar Lampung	43
V. HASIL DAN PEMBAHASAN	45
5.1 Hasil Penelitian	45
5.1.1 Disiplin.....	46
5.1.2 Tanggung Jawab	47
5.1.4 Inisiatif	50
5.1.4 Efektivitas.....	52
5.2 Pembahasan.....	61
5.2.1 Disiplin.....	61
5.2.2 Tanggung Jawab	62
5.2.3 Inisiatif	64
5.2.4 Efektivitas.....	66
5.3 Kendala dan Hambatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung Terhadap Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah ..	67
VI. PENUTUP	70
6.1 Kesimpulan	70
6.2 Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung	5
2. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung	6
3. Penelitian Terdahulu	9
4. Profil PAD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2019	43
5. Profil PAD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2020	44
6. Profil PAD Kota Bandar Lampung Tahun Anggaran 2021	44
7. Realisasi PAD Kota Bandar Lampung	54
8. Triangulasi Data Penelitian	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Kerangka Pikir	24

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Negara Indonesia merupakan Negara kesatuan yang menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi yang dimana pemerintah daerah di berikan kewenangan untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri.¹ Undang-undang No. 23 tahun 2014 pasal 1 juga menyebutkan bahwa pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pemerintah daerah juga memiliki unsur penyelenggaraan pemerintahan yang juga sekaligus sebagai lembaga legislatif pemerintah daerah yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, sebagai representasi rakyat DPRD mempunyai peran yang cukup penting. Dalam kedudukannya yang sejajar dengan pemerintah daerah, DPRD bersama dengan kepala daerah melaksanakan tugas dan fungsi-fungsi pemerintah daerah yang mencakup segala urusan daerah menurut asas otonomi dan fungsi pembantuan.² Dewan perwakilan rakyat daerah sesungguhnya lebih berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah atau kebijakan pemerintah daerah daripada sebagai lembaga legislatif. Namun juga dewan perwakilan rakyat daerah tetaplah sebagai lembaga legislatif. Hal itu membuat dewan perwakilan rakyat daerah yang ada di provinsi maupun di kota/kabupaten berhak mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) kepada pemerintah daerah.

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 1.

² Asmawi. 2014. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah. Jurnal Cita Hukum. Vol.II No.1, Hal 1.

Fungsi dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai Fungsi pembentukan peraturan daerah yang dilaksanakan dengan cara membahas bersama Kepala Daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan peraturan daerah, mengusulkan rancangan peraturan daerah, dan menyusun program pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah. Fungsi anggaran diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah. Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.³ Pemerintah daerah dalam melaksanakan program-programnya melalui organisasi perangkat daerah tentunya membutuhkan dana dalam melaksanakan kegiatannya yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dianggarkan sesuai kebutuhan daerah dan kemudian digunakan dengan efektif dan efisien. Pendapatan asli daerah yang tentunya itu sebagai sumber masukan dana daerah yang sah harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Peengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285. Dan pendapatan asli daerah meliputi:

a. Pajak daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 94 dan pasal 149

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

b. Retribusi daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah

Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), dan perusahaan milik swasta. Peran BUMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan sekali dalam menggerakkan ekonomi. Kinerja dari BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, sedangkan dari sisi eksternal BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan *multiplier effect* yang besar.

d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini seperti : Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda BPHTB, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.

Tantangan pada saat ini yang paling penting adalah bagaimana dewan perwakilan rakyat daerah dapat membuat terobosan suatu mekanisme kerja yang tentunya dapat mengoptimalkan kinerja. Masyarakat pada saat ini sangatlah berharap agar dewan perwakilan rakyat daerah dapat melaksanakan fungsi-fungsinya dengan peran yang lebih nyata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Artinya bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah harus memenuhi akuntabilitas publik, sehingga digunakan sebuah fungsi pengawasan. Fungsi inilah yang memang seharusnya di perankan oleh dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan hakikatnya sebagai lembaga legislatif yang mempunyai tiga fungsi pokok pada konteks ini ialah fungsi pengawasan. Untuk mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan daerah secara efisien dan efektif dibutuhkan pembiayaan yang baik agar bisa mencapai target yang telah di targetkan, maka dari itu diperlukan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang sehat dan faktor yang paling utama dalam pembangunan adalah adanya pembiayaan yang sehat dalam hal ini adanya pembiayaan pasti karna memiliki pendapatan yang sehat dan stabil dalam konteks ini adalah pendapatan asli daerah (PAD).

Pendapatan asli daerah yang baik dan stabil dibutuhkan oleh suatu daerah agar bisa melakukan pembiayaan pembangunan dan tidak bergantung dari biaya perimbangan atau biaya transfer dari pusat, maka dari pemerintah daerah dituntut agar memiliki pendapatan asli daerah yang baik dan stabil dan juga pemerintah daerah diharus mencari pendapatan-pendapatan asli daerah baru dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan tidak hanya terfokus pada pajak dan retribusi daerah saja terutama pada situasi pandemi covid-19 yang tidak dipungkiri sangat mempengaruhi kondisi perekonomian daerah bahkan nasional. Namun pada kondisi pada saat ini sejak awal tahun 2020 terjadi pandemi covid-19 yang menyebar di seluruh indonesia dan juga dunia, terjadinya pandemi covid-19 ini sangatlah berpengaruh kepada perekonomian Indonesia yang mana sebagian dana di daerah alokasikan kepada penanggulangan pandemi-19 untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Dan pemerintah daerah juga harus

bisa mencari sumber-sumber pendapatan daerah yang baru dan stabil agar keuangannya baik, kondisi perekonomian yang baik itu bisa kita liat pada APBD yang sehat. Provinsi Lampung yang merupakan Provinsi yang ada di Pulau Sumatera juga termasuk terdampak dari pandemi covid-19 yang mana Ibukota Provinsi yaitu Kota Bandar Lampung sangatlah terdampak dari adanya pandemi covid-19 sehingga perekonomian di daerah Kota Bandar Lampung sangat turun drastis sehingga pendapatan asli daerah (PAD) sangat berkurang dari tahun sebelum-sebelumnya.⁴

Data pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

Tabel 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandar Lampung

Tahun	2019	2020	2021
Target PAD	833,43 Miliar	1,130 Triliun	991,58 Miliar
Realisasi PAD	627,30 Miliar	537,54 Miliar	-
Presentase	75%	47%	-

Sumber: Djpk.Kemenkeu.go.id (2021)

Berdasarkan data diatas realisasi PAD Kota Bandar Lampung pada tahun 2019 tidak mencapai target yang telah ditentukan karna hanya terealisasi 627,29 Miliar dari target 980,68 Miliar atau hanya 64% yang terealisasi lalu PAD pada tahun 2020 hanya terealisasi 537,54 Miliar dari target 1,293 Triliun atau 41,6% yang mana itu sangat jauh dari target yang telah ditentukan karna juga imbas dari pandemi covid-19 yang sangat mempengaruhi pendapatan asli daerah karna Kota Bandar Lampung salah satu sumber PAD yang besar ialah dari sektor pajak dalam hal ini perekonomian sedang turun karna imbas dari pandemi covid-19.

⁴ Asmawi. 2014. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah Dan Lembaga Legislatif Daerah. Jurnal Cita Hukum. Vol.II No.1, Hal 4.

Tabel 2. Sumber pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandar Lampung

Tahun	2019	2020
Pajak Daerah	480,42 Miliar	410,45 Miliar
Retribusi Daerah	29,626 Miliar	25,725 Miliar
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	17,468 Miliar	21,276 Miliar
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	99,780 Miliar	80,085 Miliar

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung (2021)

Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandar Lampung mengalami penurunan yang sangat signifikan dibandingkan dengan target PAD yang telah ditentukan pada tahun 2020 dimasa pandemi covid-19 walaupun di tahun 2019 juga tidak mencapai target. Dan juga pemerintah Kota Bandar Lampung mengalami pengurangan transfer dana dari pusat yang membuat pemerintah Kota Bandar Lampung harus lebih mencari sumber-sumber pendapatan lain dan memanfaatkan kekayaan daerah dengan maksimal agar keuangan daerah tetap stabil dan baik. Sedangkan pendapatan asli daerah (PAD) di beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung tidak mengalami penurunan dimasa pendemi covid-19 dan bahkan ada yang tetap mencapai target bahkan ada yang melewati target pendapatan asli daerah (PAD). Maka dari itu peneliti tertarik memilih Kota Bandar Lampung sebagai lokasi penelitian karena seharusnya Kota Bandar Lampung sebagai Ibukota Provinsi Lampung mampu mendapatkan pendapatan asli daerah yang mencapai target atau bahkan lebih namun pada kenyataannya pada masa pandemi covid-19 ini PAD Kota Bandar Lampung mengalami penurunan yang sangat drastis. Pengawasan pengelolaan pendapatan asli daerah yang dilakukan DPRD Kota Bandar Lampung dapat berbentuk inspeksi langsung (*on the spot observation*) yaitu pengawasan langsung untuk meminimalisir penyimpangan atau dengan

cara pengawasan tidak langsung yang mana pengawasan secara jarak jauh dengan melihat dokumen laporan atau bahkan melalui rapat/diskusi.⁵

Merosotnya pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandar Lampung dikarenakan banyaknya hotel, restoran, rumah makan dan juga tempat hiburan tidak berfungsi atau beroperasi dampak dari pandemi covid-19. Menurunnya PAD yang awalnya dari 1,5 miliar perhari sebelum pandemi covid-19 lalu pada masa pandemi covid-19 seperti sekarang ini rata-rata pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung hanya mencapai 300 juta sampai 400 juta saja perhari.⁶

Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri termasuk juga sumber keuangannya, pada kondisi terdampak pandemi covid-19 pemerintah daerah seharusnya mencari sumber-sumber pendapatan yang baru dan lebih realistis dalam merencanakan keuangan daerah dimasa pandemi covid-19. Pendapatan asli daerah (PAD) yang mana sebagai sumber pendapatan yang digunakan untuk penyelenggaraan daerah harus dirancang dengan penuh kajian dan realistis agar target yang telah di tetapkan bisa benar terealisasi. Pada konteks ini pemerintah Kota Bandar Lampung kurang rasional dan realistis ketika menetapkan target pendapatan asli daerah sehingga pada realisasinya sangat jauh berbeda tidak tercapai targetnya. Fraksi partai keadilan sosial DPRD Kota Bandar Lampung mengingatkan agar berkaca dari realisasi tahun 2020 dan realisasi APBD tahun 2021 semester pertama, sudah seharusnya pemerintah Kota Bandar Lampung melakukan penyesuaian target pendapatan secara rasional dan terukur. Dan di tambah lagi kondisi pandemi covid-19 yang belum juga berakhir maka target pendapatan asli

⁵ Irda Yustina & Robi Cahyadi Kurniawan dkk,(2019), Pengawasan DPRD Pada Badan Pengelolaan Pajak dan Distribusi Daerah Kota Bandar Lampung, Jurnal wacana publik, Vol 13 No. 02, Hal 73.

⁶ Budi Arista. 2020. Covid-19 Akibatkan PAD Kota Bandar Lampung Merosot. <https://www.gatra.com/detail/news/480942/ekonomi/covid-19-akibatkan-pad-kota-bandar-lampung-melorot>. Diakses pada 5 November 2021.

daerah (PAD) yang telah dirubah pada perubahan APBD 2021 menjadi 1,135 Triliun dinilai tidak tidak rasional dan terukur.⁷

Pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bandar Lampung dimasa pandemi covid-19 sangatlah mengalami penurunan yang sangat dratis yang mambuat banyak organisasi perangkat daerah (OPD) banyak yang tidak terlaksana karena kondisi keuangan daerah Kota Bandar Lampung yang tidak baik.⁸ Dewan perwakilan rakyat daerah Kota Bandar Lampung sebagai lembaga legislatif dan mempunyai fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Bandar Lampung yang kemudian mempunyai tugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan yang menjadi fokus penelitian ini adalah pengelolaan pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung masih terbilang cukup lemah agar kemudian pendapatan asli daerah di rancang dan di targetkan secara realistis agar target serta realisasinya seimbang, ketika pendapatan asli daerah mencapai target yang telah ditentukan atau bahkan maka kemudian perekonomian daerah akan baik dan sehat karena pendapatan asli daerah (PAD) adalah dalah satu pendapatan yang menopang kebutuhan belanja daerah.

Adapun penelitian terdahulu yang sejenis yang sudah pernah dilakukan untuk digunakan sebagai referensi dalam melihat kinerja DPRD dalam pengawasan pengelolaan pendapatan asli daerah di Kota Bandar Lampung pada saat pandemi covid-19. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung dalam pengawasan Pendapatan asli daerah (PAD) dimasa pandemi covid-19 yang mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang kemudian membuat posisi penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya

⁷ Ikhwan Wijaya. 2021. Ingatkan hutang Pemkot, FPKS Minta Target PAD Lebih Rasional dan Terukur. <https://rri.co.id/bandar-lampung/kota-bandar-lampung/1187298/ingatkan-hutang-pemkot-fpks-minta-target-pad-lebih-rasional-dan-terukur>. Diakses Pada 1 November 2021

⁸ Berita PKS. 2021. Anggota DPRD Bandar Lampung Minta Pemkot Setop Lelang Kegiatan Infrastruktur. <https://pks.id/content/anggota-dprd-bandar-lampung-minta-pemkot-setop-lelang-kegiatan-infrastruktur>. Diakses 18 November 2021.

sehingga dapat menambah referensi untuk penulisan penelitian kedepannya.

Tabel 3. Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
1	Benny Abidin & Ratna Herawati (2018)	Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Batang.	Dewan Perwakilan rakyat daerah (DPRD) ialah lembaga yang berfungsi pengawasan pelaksanaan peraturan daerah APBD. Lalu ada juga lembaga daerah yang di bentuk oleh kepala daerah (Inspektorat).
2	Farida Tuharea (2011)	Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Papua.	Fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat Papua telah dilakukan melalui kegiatan penggunaan hak meminta keterangan kepada pemerintah daerah, penggunaan hak meminta keterangan sudah terlaksana, meskipun belum optimal.
3	Safrizal Wahyudi, Muhammad Abduh, dkk	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Langsa.	Pengaturan fungsi pengawasan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) yang terdapat dalam peraturan yaitu pasal 41 UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah. Optimalisasi fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap peningkatan Pendapatan asli daerah di Kota Langsa.

4	Farida Tuharea (2017)	Fungsi Pengawasan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Di Era Otonomi Daerah	Secara keseluruhan fungsi pengawasan baik oleh aparat intern pemerintah daerah maupun lembaga diluar pemerintahan terhadap seluruh potensi penerimaan sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang dikelola dinas pendapatan daerah
5	Mushafi (2021)	Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dalam Kajian Hukum	Pengawasan DPRD terhadap APBD secara hukum di atur dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
6	Tommy makagansa & Ronny Gosal Dkk (2017)	Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Kinerja DPRD Sangihe khusus untuk indikator belum optimal dan indikator inisiatif kinerja DPRD Sangihe belum menunjukkan peningkatan hal itu dapat dibuktikan dengan belum adanya produk peraturan daerah inisiatif DPRD.

Sumber: Data diolah oleh peneliti, 2021

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Kinerja DPRD Kota Bandar Lampung dalam pengawasan pengelolaan pendapatan asli (PAD) dimasa pandemi covid-19”.

1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka rumusan permasalahan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) dimasa pandemi covid-19?
2. Apa kendala, hambatan, tantangan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) dimasa pandemi covid-19?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan permasalahan pada penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) dimasa pandemi covid-19.
2. Untuk mengetahui apa kendala, hambatan, tantangan yang dapat mempengaruhi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) dimasa pandemi covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti
Penelitian ini merupakan kesempatan bagi peneliti untuk dapat mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan yang telah diperoleh pada program studi serta juga sebagai sarana mengembangkan ilmu pengetahuan yang dapat menambah wawasan peneliti.
2. Bagi Akademisi
Penelitian dapat menambah kepustakaan pada bidang ilmu pemerintahan atau ilmu politik dan sebagai penambah literasi yang

dapat dijadikan referensi bagi penelitian sejenis ataupun sebagai pembanding penelitian sebelumnya.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kinerja

Kinerja adalah hasil dari fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu selama satu periode waktu tertentu. Kinerja dapat di lihat dari berbagai sudut pandang tergantung pada tujuan organisasi masing-masing. Kinerja adalah hasil kerja yang dapat di capai suatu organisasi atau sekelompok orang atau individu atas suatu pelaksanaan tugas yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya dalam kurun waktu tertentu dengan cara yang benar. Dan hasil yang diperoleh oleh suatu organisasi baik organisasi tersebut bersifat dapat mencetak laba ataupun tidak dapat mencetak laba yang dihasilkan dalam satu periode waktu merupakan suatu kinerja. Analisis kinerja merupakan suatu metode atau cara untuk memahami sejauh mana kemajuan yang dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini digunakan untuk melihat keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi suatu organisasi. Untuk melakukan analisis kinerja organisasi publik, diperlukan indikator kinerja, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang ditetapkan, sehingga indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang dapat dihitung dan diukur untuk digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkat kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun tahap setelah kegiatan selesai. Indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja, yaitu sebagai berikut⁹:

1. Disiplin
2. Tanggung jawab
3. Inisiatif

⁹ Ni Kadek Suryani & John, (*Kinerja Organisasi*), (Bali: Deepublish Publisher, 2018), Hal 6.

4. Efektivitas

Sedangkan di dalam teori ini juga terdapat beberapa prinsip-prinsip di dalam kinerja antara lain :

1. Produktivitas, yaitu: tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga mengukur efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai ratio antara input dengan output.
2. Kualitas Layanan, yaitu: cenderung menjadi penting dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan publik terhadap kualitas.
3. Akuntabilitas, yaitu: menunjuk pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan birokrasi publik tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya ialah bahwa para pejabat politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu memprioritaskan kepentingan public, konsisten dengan kehendak publik.
4. Responsibilitas, yaitu: menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan birokrasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar.

2.2 Teori Pengawasan

Pengawasan adalah yang berhubungan dengan usaha menyelamatkan jalannya perusahaan kearah cita-cita yakni kepada tujuan yang telah direncanakan. Adanya berbagai jenis kegiatan pembangunan dilingkungan pemerintahan menuntut penanganan yang lebih serius agar tidak terjadi pemborosan dan penyelewengan yang dapat mengakibatkan kerugian keuangan pada Negara. Untuk menghindari hal tersebut maka diperlukan suatu sistem pengawasan yang tepat dan bertujuan untuk menjaga kemungkinan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik. fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan agar apa yang telah direncanakan berjalan sebagaimana mestinya. Termasuk kedalam fungsi pengawasan adalah identifikasi

berbagai faktor yang menghambat sebuah kegiatan, dan juga pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan organisasi dapat tetap tercapai. Sebagai kesimpulan, fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apa yang telah direncanakan dan dikoordinasikan berjalan sebagaimana mestinya atautkah tidak. Jika tidak berjalan dengan semestinya maka fungsi pengawasan juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sedang berjalan agar dapat tetap mencapai apa yang telah direncanakan. Sementara indikator pengawasan sebagai berikut ¹⁰:

- 1) Alat ukur (standard)
- 2) Penilaian (evaluate)
- 3) Koreksi (correction action)

Terselenggaranya pengawasan dalam sebuah institusi yakni untuk menilai kinerja suatu institusi dan memperbaiki kinerja sebuah institusi. Oleh karena itu dalam setiap perusahaan mutlak, bahkan rutin adanya sistem pengawasan. Dengan demikian pengawasan merupakan instrument pengendalian yang melekat pada setiap tahapan operasional perusahaan. Fungsi pengawasan dapat dilakukan setiap saat, baik selama proses manajemen atau administrasi berlangsung maupun setelah berakhir untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan suatu organisasi atau kerja. Fungsi pengawasan dilakukan terhadap perencanaan dan kegiatan pelaksanaannya. Kegiatan pengawasan sebagai fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi setelah perencanaan dibuat dan dilaksanakan. Keberhasilan perlu dipertahankan dan jika mungkin ditingkatkan dalam perwujudan manajemen/administrasi berikutnya dilingkungan suatu organisasi/ unit kerja tertentu. Sebaliknya setiap kegagalan harus diperbaiki dengan

¹⁰ Dormina Takaendengan. (2018). Analisis Fungsi Pengawasan Inspektorat Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Bisnis dan Manajemen*. Vol 6 No. 3, Hal 298.

menghindari penyebabnya baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya.¹¹

Sebagai mitra kerja pemerintah daerah dan berbagai lembaga publik lainnya, DPRD mempunyai tugas-tugas pengawasan yang bersifat khusus. Sebagai wakil rakyat di daerah, DPRD perlu untuk peka dan tanggap terhadap proses manajemen tata pemerintahan di daerah. Disini terlihat bahwa peran DPRD adalah membangun sebuah early warning system (sistem penanda bahaya) apabila terjadi kejanggalan atau penyimpangan dalam proses pengelolaan tata pemerintahan di daerah. Fungsi pengawasan oleh DPRD penting untuk membangun sistem akuntabilitas terhadap rakyat di daerah. Jadi, fungsi itu bukan untuk hanya merupakan tugas dan kewenangan DPRD untuk menilai apakah pihak eksekutif telah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan rencana program yang ditetapkan sebelumnya atau tidak.¹²

Pasal 292 dan pasal 343 UU No.27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa DPRD Provinsi-/kabupaten/kota mempunyai fungsi: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di provinsi-/kabupaten/kota. Selanjutnya, pasal 293 dan 344 menyatakan tugas dan wewenang DPRD provinsi/kabupaten/kota, yang perlu dipahami lebih jauh dalam konteks pengelolaan keuangan daerah. Pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda APBD memiliki beberapa implikasi penting, yakni :

- a) DPRD haruslah memiliki kecakapan atau kemampuan secara kelembagaan untuk mengimbangi Pemerintah Daerah. Kecakapan

¹¹ Safrizal Wahyudi. 2019. *Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Langsa. USU Law Journal*. Vol.7 No.7, Hal 1.

¹² Endang Benselina Etwiory. 2014. Analisis Kinerja DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi*, Vol. 1 No. 2, Hal 48.

ini dapat diperoleh melalui pembekalan dan pendampingan oleh tenaga ahli dan kelompok pakar-/tim ahli.

- b) Ketersediaan data/statistik yang lengkap pada setiap alat kelengkapan, terutama komisi-komisi. Artinya, setiap komisi memiliki database tentang data penting yang berhubungan dengan tupoksi SKPD mitra kerjanya. Misalnya: database dan statistik untuk bidang pendidikan. Dalam hal ini harus tersedia data tentang jumlah guru, masa pensiun, jumlah murid setiap tingkatan pendidikan, jenis kelamin guru dan murid, penyebaran sekolah, prestasi murid dan sekolah, kompetensi guru, kebutuhan guru (jumlah, bidang pelajaran, kompetensi, dll.), dan kondisi sekolah dan perlengkapannya.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menempatkan Pemerintah Daerah dan DPRD selaku penyelenggara pemerintahan daerah. Sesama unsur pemerintahan daerah pada dasarnya kedudukan Pemerintah Daerah (eksekutif) dan DPRD (legislatif) adalah sama, yang membedakannya adalah fungsi, tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya. Karena itu hubungan yang harus dibangun antara Pemerintah Daerah dan DPRD mestinya adalah hubungan kemitraan dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik (*good government*). Bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD adalah pengawasan politik, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh lembaga legislatif (DPRD) terhadap lembaga eksekutif (Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah beserta perangkat daerah) yang lebih bersifat kebijakan strategis dan bukan pengawasan teknis maupun administratif, sebab DPRD adalah lembaga politik seperti penggunaan anggaran yang telah dialokasikan disalah gunakan untuk hal-hal yang merugikan rakyat dan negara.

Aspek utama yang mendukung keberhasilan otonomi daerah, yaitu pengawasan, pengendalian, dan pemeriksaan. Ketiga hal tersebut pada dasarnya berbeda baik konsepsi maupun aplikasinya. Pengawasan

mengacu pada tingkatan atau kegiatan yang dilakukan diluar pihak eksekutif yaitu masyarakat dan DPRD, untuk mengawasi kinerja pemerintahan. Pengendalian (control) adalah mekanisme yang dilakukan oleh pihak eksekutif (pemerintah daerah) untuk menjamin dilaksanakannya sistem dan kebijakan manajemen sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Pemeriksaan Audit merupakan kegiatan oleh pihak yang memiliki independensi dan memiliki kompetensi profesional untuk memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah daerah telah sesuai dengan standar atau kreteria yang ada.

Tipe pengawasan antara lain :

- i. Pengawasan pendahuluan (*feedforward control*), dirancang untuk mengantisipasi masalah masalah atau penyimpangan penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi, pendekatan pengawasan ini lebih aktif dan agresif, dengan mendeteksi masalah masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah terjadi. Pengawasan ini akan lebih efektif hanya bila manajer mampu mendapatkan informasi akurat dan tepat pada waktunya tentang perubahan-perubahan dalam lingkungan atau tentang perkembangan terhadap tujuan yang diinginkan.
- ii. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*), pengawasan ini sering disebut “Ya-Tidak”, screening control atau “berhenti-terus”, dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana aspek tertentu dengan dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan “double-check” yang lebih menjamin ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.

- iii. Pengawasan umpan balik (*feedback control*), dikenal juga sebagai *past-action control*, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan. Sebab-sebab penyimpangan dari rencana atau standar ditentukan, dan penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan serupa dimasa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi.

Bentuk-bentuk pengawasan antara lain :

- ❖ Pengawasan hukum, yaitu suatu bentuk pengawasan yang ditujukan untuk mengetahui apakah wewenang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*gedelilijke controle*).
- ❖ Pengawasan administratif, yaitu suatu bentuk pengawasan yang bertujuan untuk mengukur efisiensi kerja.
- ❖ Pengawasan politik, yaitu suatu bentuk pengawasan yang digunakan untuk mengukur segi-segi kemanfaatan.¹³

2.3 Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang dilakukan organisasi dalam rangka penerbitan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengaturan secara sistematis sumber-sumber yang ada dalam organisasi. Pengelolaan merupakan tindakan pengusahakan pengorganisasian sumber-sumber yang ada di dalam organisasi dengan tujuan agar sumber-sumber tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan organisasi. Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya

¹³ Hananto Widodo. 2019. *parameter pengawasan politik dewan perwakilan rakyat republik indonesia menurut undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945*. Perspektif Hukum. Vol. 19 No.2 November 2019 : 229-249

pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Disini ada beberapa tujuan pengelolaan ¹⁴:

1. Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan- tujuan, sasaran- sasaran dan kegiatankegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang perkepentingan dalam suatu organisasi.
3. Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

2.5 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah terdiri dari ¹⁵:

1. Pendapatan asli daerah (PAD)
2. Pendapatan transfer
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

2.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Peengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan asli daerah berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah pasal 285 meliputi :

- a. Pajak daerah

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang

¹⁴ Edison Ledi Bulang, Pengelolaan Potensi Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul, (2017), Hal 10-11.

¹⁵ Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 1 Ayat 35.

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintahan RI Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang dimaksud pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan iuran yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

- 1) Pajak Daerah Provinsi terdiri dari :
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor
 - b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - d) Pajak Pengambilan Dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Permukaan Air
- 2) Pajak Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari :
 - a) Pajak Hotel Dan Restoran
 - b) Pajak Reklame
 - c) Pajak Hiburan
 - d) Pajak Penerangan Jalan
 - e) Pajak Penggalian dan Pengolahan Bahan Galian Golongan C
 - f) Pajak Parkir

b. Retribusi daerah

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.

Menurut UU No. 28 tahun 2009 pasal 1 yang dimaksud retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Retribusi Daerah terdiri dari :

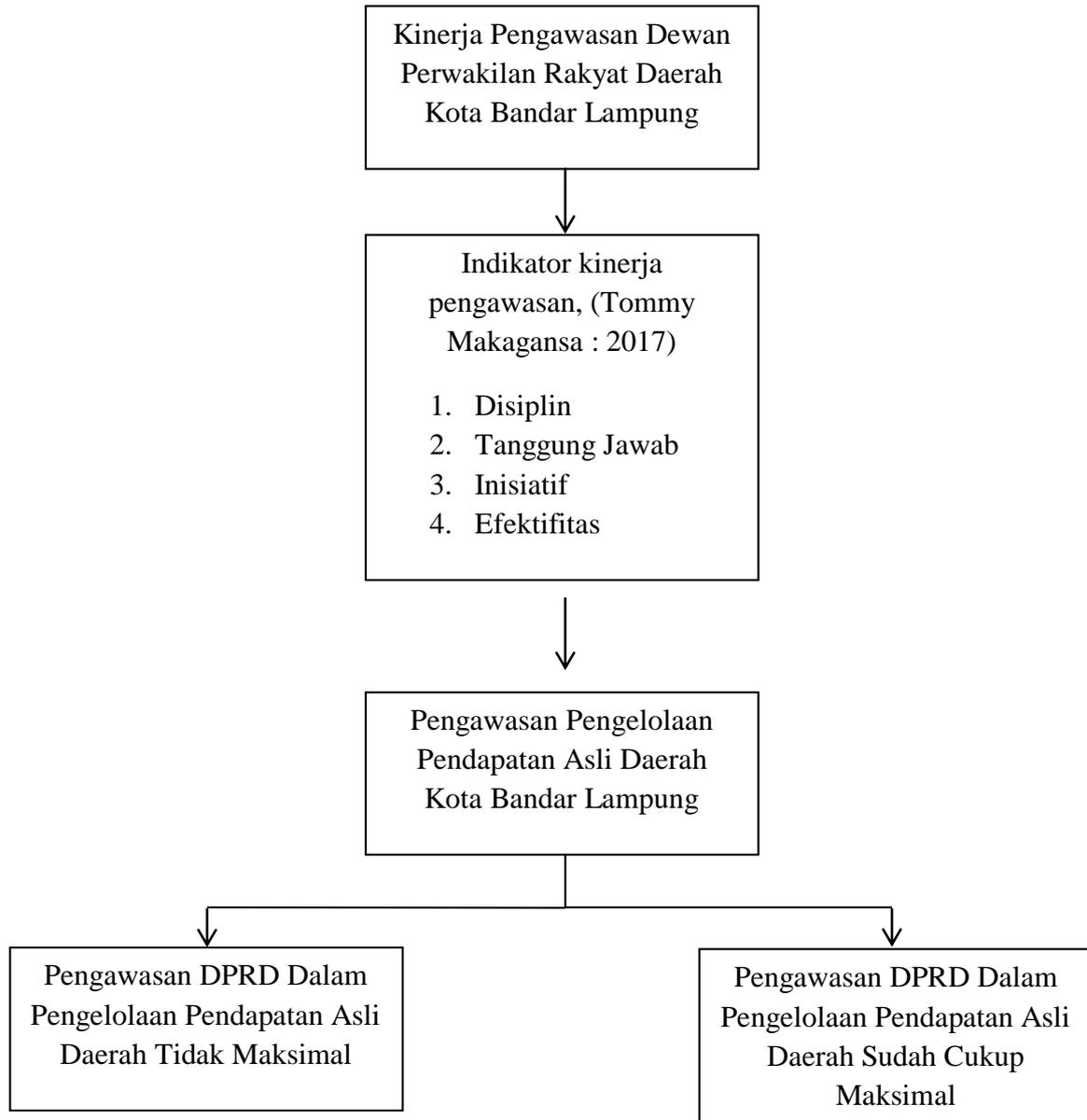
- 1) Retribusi Jasa Umum, terdiri dari:
 - a) Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - c) Retribusi Pelayanan Pasar
 - d) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
 2. Retribusi Jasa Usaha, terdiri dari:
 - a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
 - b) Retribusi Tempat Pelelangan
 - c) Retribusi Terminal
 - d) Retribusi Tempat Khusus Parkir
 - 3) Retribusi Perizinan Tertentu, terdiri dari:
 - a) Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
 - b) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
 - c) Retribusi Izin Gangguan
 - d) Retribusi Izin Trayek
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah
- Jenis pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah (BUMD), dan perusahaan milik swasta. Peran BUMD dalam peningkatan pendapatan asli daerah sangat dibutuhkan sekali dalam menggerakkan ekonomi. Kinerja dari BUMD dari sisi internal, harus mampu menjadi pemacu utama pertumbuhan dan pengembangan ekonomi, sedangkan dari sisi eksternal BUMD dituntut untuk menarik investasi asing maupun domestik agar pertumbuhan ekonomi di daerah memberikan *multiplier effect* yang besar.
- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Jenis pendapatan yang dianggarkan untuk menampung penerimaan daerah yang tidak termasuk jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis pendapatan ini seperti Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Pendapatan Bunga Deposito, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Komisi, Potongan dan Selisih Nilai Tukar, Pendapatan Denda Atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda BPHTB, Pendapatan Denda Retribusi, Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan, Pendapatan dari Pengembalian, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum, Pendapatan dari Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan, Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan dan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir.

2.7 Kerangka Pikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kinerja dewan perwakilan rakyat daerah dalam pengawasan pendapatan asli daerah adalah suatu hasil kerja DPRD Kota Bandar Lampung dalam pengawasan pendapatan asli daerah Kota Bandar Lampung yang mana pada masa pandemi covid-19 ini PAD Kota Bandar Lampung mengalami penurunan yang cukup signifikan disini lah fungsi DPRD untuk mengawasi agar PAD tetap mencapai target dan mengingatkan agar setiap menargetkan PAD harus rasional dan terukur supaya target yang sudah ditargetkan tidak jauh meleset dari yang ditargetkan.¹⁶

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, & R&D)*, (Bandung: Penerbit Alfabet, 2015), Hal 91.



Gambar 1. Bagan Kerangka Pikir

Sumber : Diolah Peneliti, 2022

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk mengeksplorasi atau mengklarifikasi suatu gejala, fenomena atau kenyataan sosial yang ada. Penelitian deskriptif berusaha untuk mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Peneliti berusaha untuk menggambarkan bagaimana kinerja DPRD dalam pengawasan pengelolaan pendapatan asli daerah di Kota Bandar Lampung pada saat pandemi covid-19 sehingga penelitian ini bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendeskripsikan suatu keadaan, peristiwa, objek apakah orang, atau segala sesuatu yang terkait dengan variabel-variabel yang bisa dijelaskan baik dengan angkaangka maupun kata-kata.¹⁷

3.2 Fokus Penelitian

Fokus memberikan batas dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga penelitian fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Fokus penelitian untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data mana yang relevan dan data yang tidak relevan. Memfokuskan dan memahami pengumpulan data dapat dipandang kemanfaatannya sebagai reduksi data yang sudah diantisipasi sebelumnya dan merupakan pra-analisis yang mengesampingkan variabel-variabel dan berkaitan untuk menghindari pengumpulan data yang berlimpah. Fokus penelitian dalam penelitian ini sesuai dengan ruusan masalah dan

¹⁷ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*, (Jambi: Pustaka Jambi, 2017), Hal 65.

tujuan penelitian yaitu menjawab pertanyaan berdasarkan teori yang dipakai.¹⁸

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dimana peneliti menangkap suatu fenomena yang terjadi disekitar atau peristiwa yang benar-benar terjadi dari objek yang akan diteliti dengan tujuan untuk memperoleh suatu data yang akurat dan benar. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan memperoleh suatu data yang berhubungan dengan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung yang mana sangat relevan untuk menjadikan lokasi penelitian terhadap judul skripsi peneliti untuk mencari tahu bagaimana pengawasan DPRD Kota Bandar Lampung terhadap pengelolaan PAD pada saat pandemi covid-19.¹⁹

3.4 Jenis Data

Data adalah bentuk jamak dari datum. Data merupakan keterangkanketerangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu hal yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan . Atau suatu fakta yang menggambarkan lewat angka, symbol, kode dan lainnya. Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data, yaitu ²⁰:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti atau lembaga tertentu langsung dari sumbernya, dicatat dan diamati untuk pertama kalinya dan hasilnya digunakan langsung oleh peneliti atau lembaga itu sendiri untuk memecahkan persoalan yang akan dicari jawabannya. Data ini sering disebut data asli, bisa berujud hasil wawancara, pengisian kuesioner. Data primer diperoleh dengan memberikan daftar pernyataan yang diberikan secara langsung (wawancara) kepada anggota komisi 2 dan Badan Anggaran DPRD Kota Bandar Lampung.

¹⁸ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*, (Jambi: Pustaka Jambi, 2017), Hal 50.

¹⁹ Samsu, Hal 45.

²⁰ Anak Agung Putu Agung & Anik Yuesti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Denpasar: Abpublisher, 2017), Hal 82-83.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang lain atau lembaga tertentu. Atau data primer yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti tabel, grafik diagram, gambar dan yang lainnya sehingga lebih informatif oleh pihak lain. Data ini diperoleh melalui dokumen laporan dan berita dari media online dan internet.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Upaya mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, maka dalam pengumpulan data ini ada beberapa teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, antara lain sebagai berikut:

1. Wawancara (*Interview*)

wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Metode ini dipergunakan untuk memperoleh data melalui wawancara langsung secara terpimpin antara penulis dengan orang yang memberi informasi dengan menggunakan daftar wawancara.

Dalam penelitian kualitatif teknik wawancara merupakan cara utama untuk mengumpulkan data. Wawancara bertujuan untuk menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami oleh informan, tetapi juga apa yang tersembunyi jauh di dalam diri informan. Adapun dalam penelitian ini pelaksanaan wawancara yang dilakukan kepada anggota dewan perwakilan rakyat daerah komisi 2 Kota Bandar Lampung dan masyarakat Kota Bandar Lampung khususnya pelaku UMKM.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi ini merupakan sumber non manusia, yang cukup bermanfaat karena telah tersedia, sehingga akan relatif murah pengeluaran biaya untuk memperolehnya; merupakan sumber yang stabil dan akurat sebagai

cerminan situasi atau kondisi yang sebenarnya, serta dapat dianalisis secara berulang-ulang tanpa mengalami perubahan. Kumpulan data tersebut berdasarkan media internet, literature dan bahan bacaan lainya yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.²¹

3.6 Teknik Pengolahan Data

Pada tahap ini data diolah sedemikian rupa sehingga dapat disimpulkan kebenarankebenaran yang dapat dipergunakan untuk menjawab masalah-masalah penelitian. Data yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut ²²:

1. Tahapan *Editing*

Penulis telah memeriksa hasil wawancara engan para narasumber untuk menjamin validitasnya agar data dapat digunakan ke proses selanjutnya. Tahap editing yang telah dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ii adalah menyajikan hasil wawancara berupa kalimat-kalimat yang kurang baku telah disajikan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dimengerti.

2. Tahapan Interpretasi

Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara daan dokumentasi dideskripsikan melalui penjelasan-penjelasan sehingga dapat diinterpretasikan untuk ditarik kesimpulan sebagai hal penelitian. Pembahasan hasil penelitian telah dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh dilapangan.

Interpretasi yang telah dilakukan oleh peneltil dalam penelitian ini adalah pembahasan hasil penelitian mengenai kinerja DPRD dalam pengawasan pengelolaan pendapatan asli daerah di Kota Bandar Lampung pada saat pandemi covid-19.

²¹ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*, (Jambi: Pustaka Jambi, 2017), Hal 96-99.

²² Anak Agung Putu Agung & Anik Yuesti, *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, (Denpasar: Abpublisher, 2017), Hal 96-101.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap interpretasi data yang diperoleh dari penelitian lapangan. Analisis data merupakan upaya atau langkah untuk menggambarkan secara naratif, deskriptif atau tabulasi terhadap data yang diperoleh. Penyimpulan atau penjelasan dari analisis data yang dilakukan melahirkan kesimpulan penelitian. Dalam analisis data, tidak bisa dilakukan begitu saja tanpa menggunakan alat analisis. Alat analisis data menentukan bagaimana kita menganalisis, menyimpulkan atau menjelaskan data yang diperoleh. Langkah dalam menganalisis data antara lain²³ :

1. Reduksi Data

Penulis memilih data-data yang digunakan untuk dianalisis terutama data primer yang bersumber dari wawancara dipilih kembali mana yang digunakan dan mana yang sama sehingga dalam penganalisisan dapat dilakukan secara sederhana dan mudah adanya data-data yang diorganisir. Reduksi data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah analisa yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data mengenai kinerja DPRD dalam pengawasan pengelolaan pendapatan asli daerah di Kota Bandar Lampung pada saat pandemi covid-19.

2. Penyajian Data

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun dan memberikan kemungkinann adanya penarikan kesimpulan dan pengambian tindakan. Melalui penyajian tersebut kita dapat memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan menganalisis atau bertindak berdasarkan pemahaman yang diperoleh dari penyajian-penyajian data tersebut. Proses yang dilakukan peneliti dengan cara menampilkan dan membuat hubungan antara fenomena.

²³ Samsu, *Metode Penelitian: (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development)*, (Jambi: Pustaka Jambi, 2017), Hal 103-110.

3. Triangulasi Data

Selain menggunakan reduksi data dan penyajian data peneliti juga menggunakan teknik triangulasi sebagai teknik untuk mengecek keabsahan data. Triangulasi adalah langkah pemaduan berbagai sumber data, peneliti, teori dan metode dalam suatu penelitian tentang suatu gejala sosial tertentu. Peneliti menggunakan triangulasi data dengan cara menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, hasil wawancara, hasil observasi atau juga mewawancarai lebih banyak lagi informan untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda

4. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi ini mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis selama menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas menempatkan salinan suatu temuan kedalam seperangkat data yang lain.

VI. PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan observasi dilapangan dan pengolahan data serta hasil pembahasan analisis teori yang peneliti lakukan dalam melakukan penelitian mengenai kinerja DPRD Kota Bandar Lampung dalam pengawasan pengelolaan pendapatan asli daerah dimasa pandemi covid-19 memperoleh hasil kesimpulan.

DPRD merupakan lembaga legislatif yang mempunyai salah satu fungsi yaitu fungsi pengawasn, dari teori yang peneliti gunakan terkait dengan pengawasan DPRD dalam pengelolaan PAD dimasa pandemi covid-19 memuat beberapa indikator yaitu disiplin, tanggung jawab, inisiatif, efektivitas yang kemudian dapat di tarik kesimpulan pada penelitian ini menjadi beberapa point di antaranya :

- DPRD Kota Bandar Lampung dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan asli daerah dimasa pandemi covid-19 sudah cukup maksimal terlihat dari indikator disiplin bahwa DPRD sering melakukan koordinasi atau hearing dengan OPD-OPD terkait secara terjadwal agar pendapatan asli daerah dapat di pantau secara terus menerus dan ketika di temukan masalah dapat cepat di tindak lanjuti.
- DPRD mempunyai kewenangan yaitu fungsi pengawasan yang dalam hal ini di implementasikan kepada pengawasan pengelolaan pendapatan asli daerah dalam hal ini DPRD harus menunaikan secara tuntas untuk mengawasi PAD Kota Bandar Lampung karna pada awal masa pandemi covid-19 ini mengalami penurunan yang kemudian pada akhir-akhir ini mengalami kenaikan yang cukup positif yang

menjadikan DPRD cukup tanggung jawab akan melakukan tugas dan fungsinya oleh karena ini DPRD memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan pengelolaan PAD dimasa yang sudah cukup maksimal dan DPRD juga melakukan kolaborasi dan koordinasi dengan pihak eksekutif melalui OPD terkait berkolaborasi untuk mencari ide-ide maupun solusi untuk menaikkan kembali PAD Kota Bandar Lampung dengan berbagai cara memberikan saran yang dapat diterima dan mencoba mendorong umkm, oleh karena itu DPRD sudah cukup maksimal dalam indikator insiatif.

- Keberhasilan organisasi dalam mencapai target-target yang telah ditentukan sebelumnya ialah tolak ukur dalam menilai efektivitas, dalam konteks ini DPRD Kota Bandar Lampung melakukan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan asli daerah dimasa pandemi covid-19 kemudian telah melakukan beberapa usaha untuk menaikkan kembali perekonomian kita untuk menaikkan pendapatan daerah Kota Bandar Lampung dengan bekerjasama dengan pihak eksekutif melalui OPD dan bisa terlihat dari PAD Kota Bandar Lampung yang mengalami kenaikan presentase pada tahun 2020 daripada tahun sebelumnya, namun memang belum mencapai target yang telah ditentukan.

6.2 Saran

Berdasarkan penelitian dan kesimpulan diatas, maka peneliti mencoba menarik beberapa saran antara lain:

- DPRD Kota Bandar Lampung dapat menjalankan pengawasan terhadap pengelolaan pendapatan asli daerah dimasa pandemi covid-19 secara cukup disiplin karena dalam mengawasi PAD selalu berkoordinasi dengan OPD terkait secara terjadwal sehingga ketika ada hal-hal permasalahan dapat cepat di tindak lanjuti terlepas dari itu juga harus terus di tingkatkan lagi agar lebih bisa mencapai target yang telah ditentukan sebelumnya.

- DPRD Kota Bandar Lampung dan OPD terkait untuk kedepannya terus mencari sumber maupun potensi-potensi yang bisa menaikkan pendapatan asli daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adisasmita, R. (2011). *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah* (Pertama). Graha Ilmu.
- Samsu. (2017). Metode penelitian: teori dan aplikasi penelitian kualitatif, kuantitatif, mixed methods, serta research & development. In *Diterbitkan oleh: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA)*.
- BPS, P. L. (2021). *Statistik Keuangan Daerah Provinsi Lampung 2020*. Jaya Wijaya.
- John, S. K. N. &. (2018). *Kinerja Organisasi* (September, Issue September). Deepublish Publisher.
- Yuesti, A. A. P. A. & A. (2017). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. ABPublishER.
- Prof.Dr.Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan r & d)*.
- Firdausy, C. M. (2017). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. In *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*.
https://www.google.co.id/books/edition/Kebijakan_dan_Strategi_Peningkatan_Penda/Q6ZeDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1

Jurnal

- Bulang, E. L. (2017). *Pengelolaan Potensi Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Srigading Kecamatan Sanden Kabupaten Bantul*. 10–11.
- Widodo, H. (2019). PARAMETER PENGAWASAN POLITIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945. *Perspektif Hukum*, 19(02), 229–249.
- Takaendengan, D. (2018). Analisis Fungsi Pengawasan Inspektorat Sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Perangkat Daerah di Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Riset Bisnis Dan Manajemen*, 6(3).

- Langsa, D. K., & Wahyudi, S. (2019). Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Kota Langsa. *Usu Law Journal*, 7(7), 152–165.
- . A. (2014). Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Dalam Perundang-Undangan Pemerintahan Daerah dan Lembaga Legislatif Daerah. *Jurnal Cita Hukum*, 2(1). <https://doi.org/10.15408/jch.v1i1.1443>
- Makagansa, T. (2017). Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Menjalankan Fungsi Anggaran Di Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Benselina Etwiory, E. (2014). Analisis Kinerja Dprd Kabupaten Maluku Tenggara Dalam Era Otonomi Daerah Performance Analysis Of South-East Maluku Regional Parliament In The Autonomy Era. *Jurnal Administrasi Publik Dan Birokrasi*, 1(2).
- Abidin, B., & Herawati, R. (2018). Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Batang. *Law Reform*, 14(2), 248. <https://doi.org/10.14710/lr.v14i2.20872>
- Yustina, I., Kurniawan, R. C., & Indrajat, H. (2020). Pengawasan DPRD Pada Badan Pengelolaan Pajak Dan Distribusi Daerah Kota Bandar Lampung. *Wacana Publik*, 13(02), 67–77. <https://doi.org/10.37295/wp.v13i02.34>

Website

- Ikhwan wijaya. (2021). *Ingatkan Hutang Pemkot, FPKS Minta Target PAD Lebih Rasional dan Terukur*. RRI. <https://rri.co.id/bandar-lampung/kota-bandar-lampung/1187298/ingatkan-hutang-pemkot-fpks-minta-target-pad-lebih-rasional-dan-terukur>
- Tuti Nurkhomariyah. (2021). *Wali Kota: PAD Bandarlampung Tahun 2020 Turun 65 Persen*. Rnollampung. <https://www.rmollampung.id/wali-kota-pad-bandarlampung-tahun-2020-turun-65-persen>
- Budi Arista. (2020). *COVID-19 Akibatkan PAD Kota Bandar Lampung Melorot*. Gatra Com. <https://www.gatra.com/detail/news/480942/ekonomi/covid-19-akibatkan-pad-kota-bandar-lampung-melorot>
- DPP PKS. (2021). *Anggota DPRD Bandar Lampung Minta Pemkot Setop Lelang Kegiatan Infrastruktur*. Berita PKS. <https://pks.id/content/anggota-dprd-bandar-lampung-minta-pemkot-setop-lelang-kegiatan-infrastruktur>

Peraturan/Dokumen

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Dokumen Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandar Lampung